

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Dissertasi*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Angi, Yohana Febiani, and Maria I. Tiwu. "Pengaruh Locus Of Control, Independensi, Dan Kompetensi Dalam Mendeteksi Fraud (Studi Kasus Pada Bpk Perwakilan Provinsi Ntt)." *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS* 11.1 (2023): 22-30.
- Arsyad, Lincoln. "Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah." (*No Title*) (1999).
- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of urban economics*, 52(1), 93-108
- Bastian, I. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian Indra dan Gatot S, 2003, Sistem Akuntansi Sektor Publik- Konsep untuk Pemerintah Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Batafor, Gregorius Gehi. "Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT." *Program PascaSarjana: Universitas Udayana* (2011).
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). Fiscal decentralization in developing countries. terjm. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bird, Richard M., and François Vaillancourt. "Changing with the times: success, failure and inertia in Canadian federal arrangements, 1945-2002." *Federalism and Economic Reform: International Perspectives* (2006): 189-248.
- Boediono, 1997. Ekonomi Pembangunan, Cetakan ke 8, Edisi 10. BP-FE. UGM Yogyakarta.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya
- Eisenhardt, Kathleen M. "Agency theory: An assessment and review." *Academy of management review* 14.1 (1989): 57-74.

- Gupta, Anil K., and Vijay Govindarajan. "Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation." *Academy of Management journal* 27.1 (1984): 25-41.
- Gujarati*, D. N. 2013. Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima. Mangunsong, R. C. penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Jensen, M. and Meckling, W., 1976, "Theory of the Firm : Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure", *Journal of Finance Economics* 3, pp. 305-360.
- Kupang, BPS Kota. "Berita Resmi Statistik." *BPS Kota Kupang* (2017).
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan pembangunan daerah, reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Thelwall, Mike, and Brian Cugelman. "Monitoring Twitter strategies to discover resonating topics: The case of the UNDP." (2017).
- Potthast, Nadine, et al. "BIFL-Bielefelder Fragebogen zur Lebenszufriedenheit." (2018).
- Oates, Wallace E. "Fiscal decentralization and economic development." *National tax journal* 46.2 (1993): 237-243.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
- Hartiningsih, N., & Halim, E. H. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7(2), 258-269.
- Korry, I. Nyoman Sugawa. "Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras." *Kertha Wicaksana* 12.1 (2018): 76-79.
- Korry, I. Nyoman Sugawa. "Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras." *Kertha Wicaksana* 12.1 (2018): 76-79.

- Widyawati, Sze Sze. "Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional= Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN." (2014).
- Sularso, Havid, and Yanuar E. Restianto. "Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah." *Media Riset Akuntansi* 1.2 (2012).
- Murray, D. 1988. The Performance Effects of Participative Budgeting: An Integration of Intervening and Moderating Variables, *Behavior Research in Accounting*, Vol. 2: 104-123.
- Khusaini, Mohammad. *Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006.
- Lugastro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Mahmudi, 2007. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. Menejemen kinerja sektor publik(edisi 2). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI
- Oates, Wallace E. "Fiscal decentralization and economic development." *National tax journal* 46.2 (1993): 237-243.
- Peraturan Pemerintah Daerah No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah
- Pemendagri No 13. Tahun 2006 tentang Pedoman pengelohan keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PNK. 07/2010 Tentang Pedoman Umum

Peraturan Menteri dalam Negeri RI No 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Prasetya, Arif Budi, and Shinta Permata Sari. *Analisis Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APDB) Dengan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Priyatno Dwi. 2009. Mandiri Belajar SPSS. Mediakom. Yogyakarta.

Restianto, Sularso. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah." *Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto* (2011).

Rostow dan Musgrave, 1996. Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Setiawan, Muhammad Bhakti, and Abdul Hakim. "Indeks pembangunan manusia Indonesia." *Jurnal Economia* 9.1 (2013): 18-26.

Sugiyono, P. D. "Metode Peneliiian." *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2010).

Suparmoko, M., 2002. Ekonometrika Pembangunan. BPFE, Jakarta Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan. Penerbit :Salemba, Jakarta

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Todaro, M. P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H. Munandar (ed.); Ketujuh). Erlangga.

Undang-Undang No 17. Tahun 2003, Tentang Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114

Jl. Prof Dr. Herman Johannes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.

Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 523/WM.H16/SK.CP/2024

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MARIA LAETTITIA BOLIINA KROMEN
NIM : 811211030
Fakultas/Prodi : Ekonomika dan Bisnis/Manajemen (S2)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. E. Perseveranda, SE.,M.Si
2. Dr. Simon Sia Niha, SE.,M.Si
Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN ALOKASI
BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **25 (Dua Puluh Lima) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 16 Juni 2024

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk